

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

2018

KABUPATEN KUTAI BARAT



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

2018

**KABUPATEN
KUTAI BARAT**



ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018

Nomor Publikasi : 64020.1821
Katalog BPS : 4102002.6402
Nomor ISBN : 978-602-9175-32-5
Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm
Jumlah Halaman : *viii* + 59 Halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut dirangkum kedalam satu indikator tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dinamika indikator IPM tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM-nya.

Selain angka IPM, publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 juga menyajikan data yang relevan dengan indikator IPM, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penyajian data-data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Barat.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Sendawar, Oktober 2018

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT
KEPALA,



GANDI WILYANTO

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vi</i>
DAFTAR TABEL	<i>viii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	6
1.3. Sistematika Penulisan Laporan	7
BAB II PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	8
2.1 Apa itu IPM	9
2.2 Manfaat IPM	14
2.3 Keterbatasan IPM	14
2.4 Konsep dan Metodologi Komponen Penyusun IPM.	16
2.5 Inovasi Dalam Penghitungan IPM.....	19
BAB III PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	26
3.1 Tren Positif untuk Hidup Lebih Lama	29
3.2 Kesempatan Memperoleh Pendidikan Semakin Luas	30
3.3 Standar Hidup Semakin Meningkatkan	34

BAB IV PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK UMUR PANJANG & HIDUP SEHAT	36
4.1 Trend Demografi.....	38
4.2 Akses Layanan dan Sumber Daya Kesehatan.....	40
4.3 Daya Tahan Untuk Bertahan.....	41
BAB V PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN	44
5.1 Sumber Daya Pendidikan	46
5.2 Angka Melek Huruf dan Partisipasi Sekolah	48
BAB VI PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH SUMBER DAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN STANDAR HIDUP	53
6.1 Kinerja Ekonomi	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusun.....	10
Gambar 2.2	Dimensi Pembangunan Manusia.....	11
Gambar 2.3	Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP	20
Gambar 3.1	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2017	27
Gambar 3.2	Perbandingan Kecepatan Perubahan Nilai IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2017.....	28
Gambar 3.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017..	29
Gambar 3.4	Peningkatan per Tahun Angka Harapan Hidup Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen).....	30
Gambar 3.5	Angka Harapan Sekolah (<i>Expected Years Schooling</i>) Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	31
Gambar 3.6	Peningkatan per Tahun Angka Harapan Lama Sekolah (<i>Expected Years Schooling</i>) Nasional, serta Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)	32
Gambar 3.7	Angka Rata-rata Lama Sekolah (<i>Mean Years Schooling</i>) Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	33
Gambar 3.8	Peningkatan per Tahun Angka Rata-rata Lama Sekolah (<i>Mean Years Schooling</i>) Kabupaten Kutai	

	Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)	33
Gambar 3.9	Rata-rata Pengeluaran Rill Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2017	35
Gambar 3.10	Peningkatan Rata-rata Pengeluaran Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)	35
Gambar 4.1	Piramida Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 (persen)	40
Gambar 4.2	Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 15 - 49 Tahun Menurut Jumlah Anak yang Lahir Hidup (ALH) dan Jumlah Anak yang Masih Hidup (AMH), Tahun 2016	43
Gambar 5.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017	50
Gambar 6.1	Perkembangan PDRB Perkapita Kutai Barat (Juta Rp) Tahun 2013-2017	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru.....	22
Tabel 4.1	Indikator Demografi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2017	39
Tabel 5.1	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun Ajaran 2015-2017.....	47
Tabel 5.2	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kutai Barat, Tahun 2015-2017	49
Tabel 5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kutai Barat, Tahun 2015-2017	51
Tabel 5.4	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Di Kutai Barat, Tahun 2015-2017	54
Tabel 6.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Kabupaten Kutai Barat, Tahun 2013 - 2017	56
Tabel 6.2	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2013 - 2017.....	57
Tabel 6.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2013—2017	58



BAB 1

PENDAHULUAN

<https://kubarkubps.go.id>



1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas hidup penduduk atau lebih populer disebut dengan pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks lebih luas, pembangunan yang dilakukan lebih dari sekedar meningkatkan kondisi ekonomi manusia. Pembangunan tersebut lebih ditekankan pada manusia sebagai obyek pembangunan, serta perluasan kesempatan dan pilihan bagi manusia.

Pembangunan manusia diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, melalui peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang seringkali menjadi tujuan pembangunan, pada kenyataannya tidak serta merta dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan dipandang sebagai salah satu alat pembangunan yaitu untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia, dan bukan merupakan tujuan akhir dari suatu pembangunan.

Pembangunan manusia juga difokuskan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih. Dengan kata lain, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan memberikan kesempatan bagi individu untuk dapat menggunakan kemampuannya tersebut. Terdapat tiga pondasi bagi pembangunan manusia, yaitu: (1) memiliki umur panjang, hidup secara sehat dan kreatif; (2) memiliki pengetahuan, serta (3) memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak. Jika ketiga pondasi tersebut dapat dimiliki, maka terdapat peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Secara fundamental, pembangunan manusia juga diartikan sebagai peningkatan kesempatan untuk memilih. Pembangunan seharusnya dimaksudkan untuk menciptakan alternatif pilihan yang lebih banyak bagi manusia. Proses pembangunan manusia seharusnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, untuk dapat mengembangkan potensi maksimal mereka dan untuk memiliki kesempatan menuju kehidupan yang produktif dan kreatif.

Human Development Report pertama yang dipublikasikan pada tahun 1990 oleh United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa:*"Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang."*...

Kutipan tersebut secara jelas menekankan pesan utama agar pembangunan dilakukan dengan berpusat pada manusia, yaitu dengan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas manusia. Lebih lanjut, ukuran kinerja ekonomi yang digunakan, seperti PDRB per kapita, dirasakan masih belum cukup untuk digunakan sebagai proxy bagi ukuran keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, digunakan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara lebih luas telah dapat mengukur hasil capaian pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan dan kemampuan. Kedua penggunaan kapabilitas yang mereka miliki seperti untuk menggunakan waktu luangnya, baik untuk tujuan produktif ataupun aktivitas lainnya, seperti sosial, budaya dan politik. Jika kedua sisi tersebut tidak seimbang, maka kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Agar konsep pembangunan manusia dapat mudah diterjemahkan kedalam penyusunan kebijakan, maka pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Selama bertahun-tahun, UNDP telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik untuk menilai capaian kinerja pembangunan manusia. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kesulitan dalam penyederhanaan konsep holistik pembangunan manusia menjadi satu angka. Oleh karenanya, penting untuk disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari ukurannya. Sangatlah tidak mungkin untuk menghasilkan ukuran yang komprehensif atau bahkan suatu kumpulan indikator yang komprehensif, karena banyak dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur.

Dalam konteks Kutai Barat, pembangunan manusia tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Adapun visi Pemerintah Kutai Barat adalah *"Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"*. Dalam misinya, pembangunan manusia tertuang dalam beberapa poin, salah satunya semakin sejahtera. Yang diartikan bahwa di masa yang akan datang dapat tercipta kualitas hidup masyarakat Kutai Barat yang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan,

kesehatan dan memiliki pendapatan yang lebih baik.

Selanjutnya, terdapat pada poin peningkatan kualitas SDM yang diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan menjadi modal dasar dalam proses pembangunan di Kutai Barat. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat, serta dapat mendukung pembangunan Nasional.

Penjabaran visi dan misi tersebut tertuang dalam berbagai program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Program pembangunan yang baik didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, dalam perencanaannya program dapat dibuat secara sistematis dan komprehensif dengan didasarkan pada data yang akurat. Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Kebijakan dan strategi yang telah dilakukan perlu dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga data statistik tersebut sangat diperlukan.

Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*). Daerah dengan IPM masih rendah akan mendapatkan DAU yang lebih besar daripada daerah dengan IPM tinggi. Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogyanya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.

Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan Publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 adalah untuk memperoleh gambaran kondisi mengenai kualitas hidup penduduk atau capaian pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Barat, yang mencakup variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Secara rinci, tujuan Publikasi ini adalah:

- 1) Menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Barat yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan.
- 2) Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Menyediakan pembahasan mengenai keterkaitan pembangunan manusia dengan dimensi lain pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan anggaran, terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

1.3 Sistematika Penulisan Laporan

Publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya Publikasi Analisis Kualitas Hidup Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 dengan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- 2) Bab II memuat pengertian Indeks Pembangunan Manusia, sumber data IPM serta konsep dan definisi yang dianggap penting. Berdasarkan uraian Bab II ini diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia serta komponen-komponen yang mendukung penyusunan Indeks Pembangunan Manusia.
- 3) Bab III berisi trend Indeks Pembangunan Manusia serta komponen-komponen penyusunnya.
- 4) Bab IV berisi tabel-tabel tentang pembangunan manusia untuk umur panjang dan hidup sehat.
- 5) Bab V berisi tabel-tabel tentang pembangunan manusia untuk memperoleh pengetahuan.
- 6) Bab VI berisi tabel-tabel tentang pembangunan manusia untuk memperoleh akses ke sumber daya dalam rangka peningkatan standar hidup.



BAB 2

PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



2.1 Apa itu IPM ?

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan perluasan pemahaman dari kesejahteraan hidup manusia secara lebih luas, tidak hanya sekedar kesejahteraan secara ekonomi saja. Pendekatan pembangunan tersebut berpusat pada manusia dan perluasan kesempatan serta pilihan dalam hidup manusia.

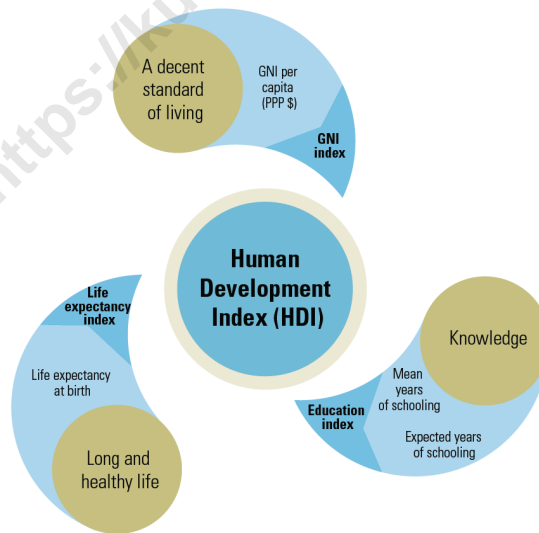
Pembangunan manusia lebih difokuskan kepada peningkatan hidup manusia sebagai yang utama, dan bukan sekedar pencapaian pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi tetap diciptakan namun bukan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai, namun lebih kepada sebagai sarana untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Selain itu, pembangunan manusia juga diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut dimungkinkan jika SDM dibangun kemampuan dan kapasitasnya, serta diberikan kesempatan untuk mempergunakan kemampuan dan kapasitasnya tersebut, sehingga diharapkan kesempatan lain akan lebih terbuka untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari berbagai aspek kehidupan manusia.

Sejak pengukuran tersebut diperkenalkan, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan

pendidikan. Akses terhadap ketiga hal tersebut merupakan representasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan pilihan, baik itu pada aspek ekonomi maupun sosial, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat 3 (tiga) komponen penyusun IPM, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi (Gambar 2.1). Aspek kesehatan dalam pembangunan manusia diukur oleh indeks harapan hidup sebagai representasi kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Aspek pendidikan diukur oleh indeks pendidikan yang diperoleh dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Standar hidup yang layak merupakan gambaran dari aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi tersebut dihitung dengan menggunakan indikator GNI per kapita.

Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusun

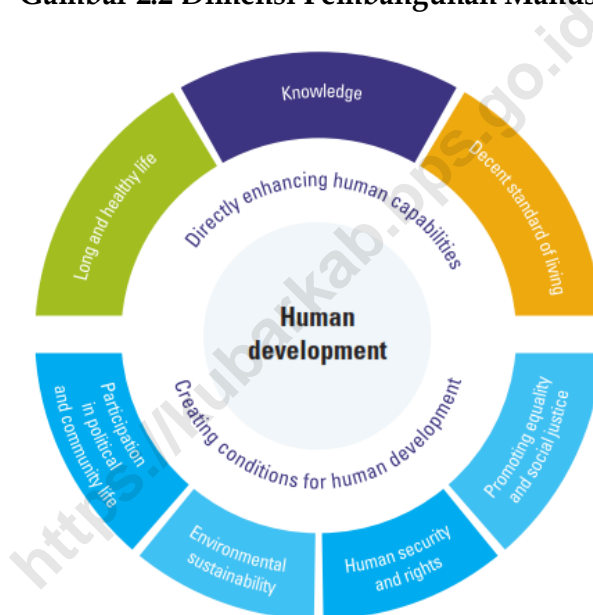


Sumber: Human Development Report, UNDP, 2015

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan dilakukannya pembangunan manusia. Aspek tersebut diantaranya adalah

keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan agenda pembangunan baru pasca tahun 2015, pembangunan manusia masih dianggap relevan untuk mengartikulasikan tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan manusia dengan menciptakan kondisi lingkungan yang berkeadilan, berkelanjutan dan stabil (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Dimensi Pembangunan Manusia



Sumber: Human Development Report, UNDP, 2015

Dalam HDR pertama di tahun 1990, disebutkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya melibatkan pembentukan kapabilitas seorang manusia, namun juga termasuk bagaimana manusia tersebut dapat menggunakan kapabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia merupakan partisipan yang aktif dalam memaksimalkan pilihan hidupnya berdasarkan kapabilitas yang dimilikinya. Sebagai partisipan yang aktif, maka manusia dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Peran aktif tersebut dapat ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam memberikan

masukan bagi pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan mengindikasikan kapabilitas seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam menciptakan pembangunan. Selain itu, partisipasi dalam kehidupan politik dan komunitas juga berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan kapabilitas seseorang ketika memberikan masukan untuk memberikan pengaruh atas pengambilan keputusan diberbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya dan sosial. Berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan misalnya adalah penyampaian aspirasi kepada lembaga perwakilan, buruh yang bergabung dalam serikat buruh untuk turut serta menciptakan kondisi bekerja yang lebih baik, pergerakan sosial untuk melawan kemiskinan dan lain-lain. Berbagai bentuk partisipasi tersebut mengandung nilai intrinsik bahwa keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan manusia adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam kaitannya dengan lingkungan, studi empiris yang dilakukan oleh Maccari dengan menggunakan data 129 negara menunjukkan terdapat keterkaitan antara keberlanjutan lingkungan dan pembangunan manusia dalam bentuk kurva U. Model menunjukkan bahwa hingga pada level IPM tertentu terdapat kecenderungan korelasi negatif, dimana kualitas lingkungan cenderung menurun seiring dengan penambahan nilai IPM. Sebaliknya, setelah titik minimum dari kualitas lingkungan, terdapat kecenderungan bahwa negara-negara dengan tingkat IPM yang lebih tinggi akan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik. Tren positif tersebut mengindikasikan keberhasilan capaian kebijakan lingkungan yang sejalan dengan pembangunan negara tersebut. Oleh karena itu, dalam membangun SDM diperlukan pengetahuan awal mengenai capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Informasi tersebut dapat digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang menyeluruh, tidak saja aspek

pembangunan manusianya namun juga dengan sambil memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam publikasi HDR 1994, disebutkan bahwa pembangunan manusia berkaitan erat dengan rasa aman individu, namun tidaklah identik. Terdapat tujuh dimensi penting dari keamanan, yaitu (1) ekonomi, (2) kesehatan, (3) urusan pribadi, (4) politik, (5) makanan, (6) lingkungan, dan (7) masyarakat. Konsep pembangunan manusia lebih ditekankan pada perluasan pilihan dan kebebasan bagi manusia. Sementara itu, rasa aman pada manusia ditekankan pada pemberian jaminan atas kebebasan tersebut sehingga masyarakat dapat menjalankan pilihan tersebut dengan rasa aman dan memiliki rasa percaya bahwa kesempatan untuk memilih tidak akan terganggu atau hilang. Adanya rasa aman pada manusia, dengan cara menghilangkan atau meniadakan berbagai ancaman, akan menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi individu untuk berkembang dalam proses pembangunan manusia.

Kondisi yang juga diperlukan dalam menjamin capaian pembangunan manusia adalah adanya kesetaraan dalam masyarakat. Niskanke dan Thorbecke (2006) menyatakan bahwa keberadaan disparitas dalam masyarakat dapat menciptakan *rent-seeking*, situasi sosial politik yang tidak stabil, alokasi pendapatan yang kecil bagi kelas menengah ekonomi, yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya investasi dan menekan pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai suatu media yang dapat menciptakan proses pembangunan manusia. Oleh karena itu, selain juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan manusia, perlu juga diperhatikan apakah berbagai kondisi yang diperlukan agar tercipta pembangunan manusia telah tersedia di suatu wilayah.

2.2 Manfaat IPM

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (2) pengetahuan (*knowledge*), dan (3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik (Regional) Bruto (PDB/PDRB) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Selain itu, IPM juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Data IPM dapat digunakan sebagai dasar pemeringkatan atau penentuan level capaian pembangunan suatu wilayah/Negara. Lebih lanjut, IPM termasuk data strategis di Indonesia karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3 Keterbatasan IPM

Seperti indeks komposit lainnya, terdapat beberapa keterbatasan IPM. Keterbatasan tersebut perlu dipahami untuk menghindari kesalahan pada penggunaan indeks tersebut. Lebih lanjut, dengan memahami keterbatasan tersebut, diharapkan menjadi bahan masukan untuk pengembangan ketersediaan dan reliabilitas data, khususnya data

yang terkait dengan indikator ketiga dimensi pembangunan manusia. Adapun beberapa keterbatasan IPM tersebut adalah:

- 1) Indeks tersebut bukan merupakan suatu ukuran yang komprehensif mengenai pembangunan manusia. Indeks tersebut hanya mencakup tiga aspek dari pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi, tidak termasuk aspek penghargaan diri, kebebasan politik, dan masalah lingkungan.
- 2) Indeks tersebut tidak dapat menilai perkembangan pembangunan manusia dalam jangka pendek, karena komponen angka harapan hidup, tidak responsif terhadap perubahan kebijakan dalam jangka pendek.
- 3) IPM memasukkan variasi pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Ini berarti bahwa IPM yang sama dari dua wilayah tidak mengindikasikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki pembangunan manusia yang identik. Dengan kata lain, mungkin terdapat perbedaan bagaimana pembangunan manusia didistribusikan antar sub wilayah atau antar kelompok sosial.

Dalam perjalanannya, IPM terus diteliti dan mengalami penyempurnaan. Oleh karena itu, indeks tersebut diterima secara luas sebagai indikator yang baik dalam melihat tingkat pembangunan manusia. Beberapa alasan mengapa IPM merupakan indikator yang cukup baik sebagai ukuran pembangunan manusia, adalah:

1. IPM menterjemahkan secara sederhana konsep yang cukup kompleks kedalam tiga dimensi dasar yang terukur.
2. IPM membantu dalam pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi menjadi berfokus pada manusia.
3. IPM berfokus pada kapabilitas yang relevan, baik untuk negara maju dan berkembang, sehingga menjadikan indeks tersebut sebagai alat yang universal.

4. IPM menstimulasi diskusi mengenai pembangunan manusia.
5. IPM memberikan motivasi bagi pemerintah untuk berkompetisi secara sehat dengan negara/wilayah lain melalui keterbandingan angka IPM.

2.4 Konsep dan Metodologi Komponen Penyusun IPM

Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam menganalisis kondisi pembangunan manusia di Kutai Barat. Adapun konsep dan definisi dari variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir; indeks pendidikan diukur dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan indeks pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita

yang disesuaikan.

Perumusan matematis penghitungan masing-masing indeks sebagai berikut.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Keterangan:

$I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan,

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan,

$I_{pengeluaran}$ = Indeks Pengeluaran,

AHH = Angka Harapan Hidup,

HLS = Harapan Lama Sekolah,

RLS = Rata-rata Lama Sekolah.

Adapun penentuan nilai minimum dan maksimum sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

⁾ Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: kategori rendah untuk IPM kurang dari 60, kategori sedang atau menengah untuk nilai IPM antara 60 sampai dengan di bawah 70, tinggi untuk nilai IPM antara 70 sampai dengan di bawah 80 dan sangat tinggi untuk IPM 80 ke atas.



Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

2.5 Inovasi Dalam Penghitungan IPM

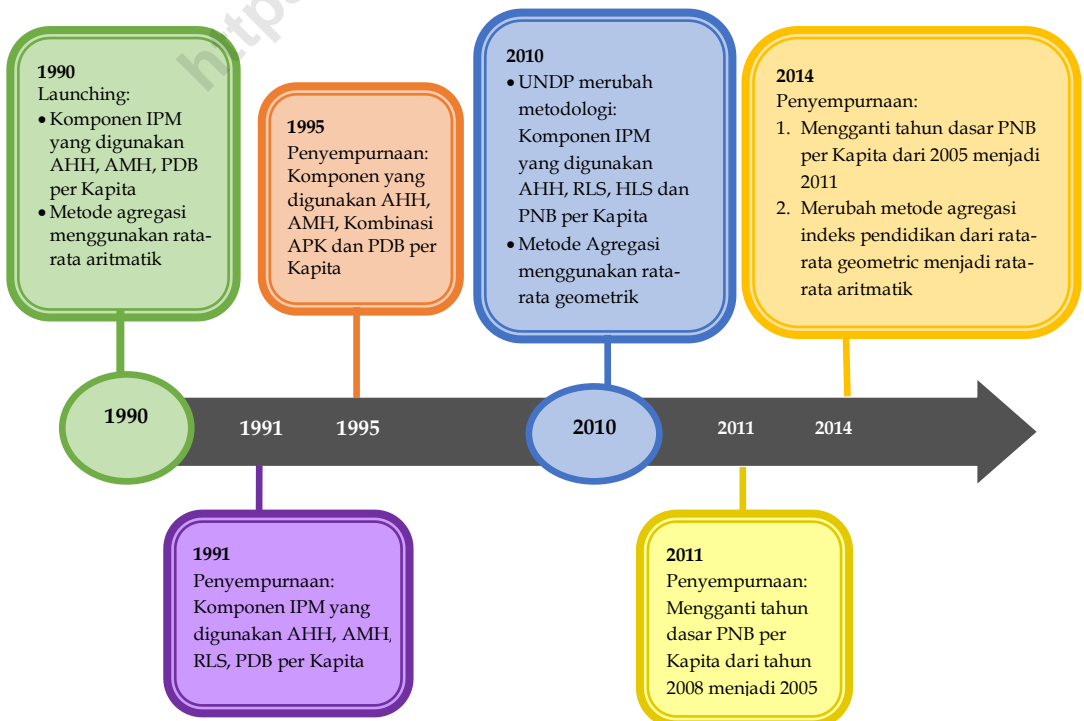
Indikator IPM telah beberapa kali mengalami penyempurnaan sejak pertama kali diperkenalkan, yaitu di tahun 1991, 1995 dan 2010. Saat pertama kali diperkenalkan, IPM dihitung melalui pendekatan tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang diperkirakan dengan angka harapan hidup saat lahir. Dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan menggunakan indikator angka melek huruf dewasa. Dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diperkirakan dengan PDB (PDRB) per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Pada tahun 1991, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Sehingga, pengukuran dimensi pengetahuan masyarakat dilakukan dengan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Masing-masing indikator tersebut diberikan bobot/penimbang. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah diberi

bobot sepertiga. Pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM dengan cukup signifikan. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar Gabungan (*Combined Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Gambar 2.3 Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP



Catatan :

AHH: Angka Harapan Hidup Saat Lahir
AMH: Angka Melek Huruf
RLS: Rata-rata Lama Sekolah
PDB: Produk Domestik Bruto

APK: Angka Partisipasi Kasar
HLS: Harapan Lama Sekolah
PNB: Produk Nasional Bruto

Penyempurnaan dilakukan kembali pada tahun 2011. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Kemudian pada tahun 2014, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar dapat diperoleh suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Penyempurnaan penghitungan IPM dilakukan, karena indikator pendidikan, Angka Melek Huruf (AMH) dinilai sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak mampu menggambarkan kualitas pendidikan. Nilai AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif untuk membedakan kondisi antar wilayah akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya, indikator PDB/PDRB per kapita yang merupakan *proxy* pendapatan masyarakat tidak cukup representatif dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Besaran PDB/PDRB diciptakan dari seluruh faktor produksi, termasuk faktor produksi dari luar. Sehingga, jika besaran balas jasa faktor produksi yang berasal dari luar wilayah tersebut cukup besar, maka PDB/PDRB per kapita tidak dapat menangkap pendapatan yang dinikmati oleh penduduk lokal suatu wilayah. Sehingga indikator

tersebut tidak cukup representatif dalam menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah.

Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan antar dimensi pembangunan. Oleh karena itu, dalam menghitung indeks komposit IPM, maka digunakan rata-rata geometrik. Hal ini disebabkan karena rata-rata geometrik cukup sensitif dalam menangkap adanya ketimpangan antar dimensi pembangunan manusia di suatu wilayah. Rata-rata aritmatik, jika digunakan, menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

Tabel 2.1 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Adanya perubahan dalam sistem penghitungan IPM membawa dampak langsung, baik terhadap besaran nilai IPM maupun terhadap peringkat IPM suatu wilayah. Secara umum, besaran nilai IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena

perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Perbedaan metode penghitungan juga berdampak terhadap peringkat IPM. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada indeks dimensi, yang pada akhirnya mempengaruhi agregasi indeks secara signifikan. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode penghitungan tersebut tidak sama.

Indonesia juga telah mengadopsi penghitungan metode baru IPM. Dengan mempertimbangkan kelemahan pada penghitungan metode lama, maka implementasi metode penghitungan yang baru dirasakan perlu, sehingga nantinya nilai IPM Indonesia dapat diperbandingkan dengan nilai IPM Negara lain sebagai cara untuk mengukur capaian pembangunan manusia. Sejak tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- a. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini didekati dengan pengeluaran per kapita.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purchasing power parity*) yang digunakan.

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Penambahan jumlah komoditas dilakukan, selama kurun waktu 1990 hingga 2014 terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pada jumlah komoditas untuk melakukan penghitungan paritas daya beli masyarakat.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.



BAB 3

PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUTAI BARAT

<https://kab.kutai-barat.go.id>



3

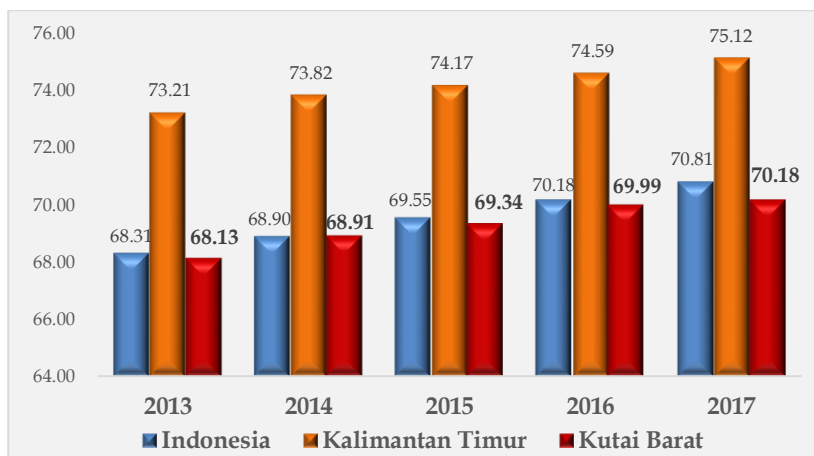
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM, sebagai indikator komposit tunggal, memberikan gambaran mengenai tingkatan status pembangunan manusia di suatu wilayah. Jika dibandingkan antar waktu, maka IPM dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pembangunan manusia dalam suatu periode tertentu. Selain itu, jika dibandingkan antar wilayah, besaran IPM memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan pembangunan manusia suatu wilayah, dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Secara umum, terdapat peningkatan nilai IPM Kutai Barat selama periode 2013 hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun di Kutai Barat.

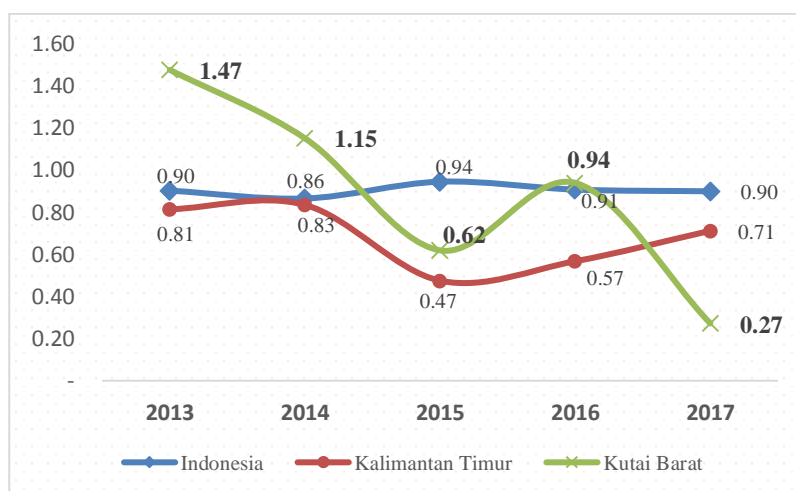
Jika dibandingkan dengan angka IPM Kalimantan Timur dan Nasional, terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten Kutai Barat berada dibawah angka IPM Kalimantan Timur dan Nasional. Namun demikian, status pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Barat sudah masuk dalam kelompok/klasifikasi dengan status “*tinggi*”.

Gambar 3.1 Perbandingan IPM Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2017



Lebih lanjut, Gambar 3.2 menunjukkan perbandingan antara kecepatan perubahan nilai IPM Kabupaten Kutai Barat dengan perubahan IPM Nasional dan Kalimantan Timur selama tahun 2013 dan 2017. Gambar menunjukkan bahwa terdapat perubahan kecepatan nilai IPM Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2014, peningkatan nilai IPM Kabupaten Kutai Barat lebih cepat dibandingkan perubahan nilai IPM Nasional maupun Kalimantan Timur. Nilai IPM Nasional meningkat sebesar 0,86 persen di tahun 2014 dan Kalimantan Timur sebesar 0,83 persen, sedangkan nilai IPM Kabupaten Kutai Barat meningkat lebih cepat sebesar 1,15 persen. Pada tahun 2015 terjadi perlambatan pada nilai IPM Kabupaten Kutai Barat yang hanya meningkat sebesar 0,62 persen, sama halnya dengan Kalimantan Timur yang sebesar 0,47 persen. Sementara itu, secara umum terdapat peningkatan yang lebih cepat di beberapa Kabupaten sehingga secara nasional terdapat percepatan peningkatan nilai IPM Nasional, dengan besaran peningkatan sebesar 0,94 persen. Pada tahun 2016, peningkatan nilai IPM Kutai Barat menunjukkan trend positif dan lebih tinggi dari peningkatan nilai IPM Kalimantan Timur dan Nasional, yaitu sebesar 0,94 persen. Namun kondisi tahun 2017 kembali mengalami perlambatan menjadi 0,27 persen.

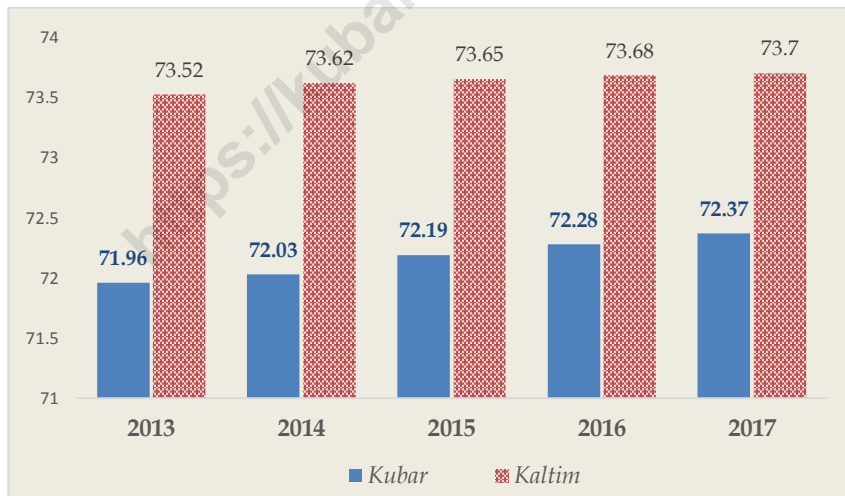
Gambar 3.2 Perbandingan kecepatan perubahan nilai IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2017



3.1 Tren Positif untuk Hidup Lebih Lama

Angka harapan hidup merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Dikaitkan dengan SDGs, ukuran tersebut dapat digunakan untuk melakukan *proxy* pengukuran capaian salah target dari SDGs yang terkait dengan pembangunan manusia, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Target tersebut bertujuan untuk mengakhiri kematian anak, kematian ibu dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Sehingga secara tidak langsung, capaian dari upaya menekan angka kematian neonatal dapat tergambar dari peningkatan angka harapan hidup saat lahir.

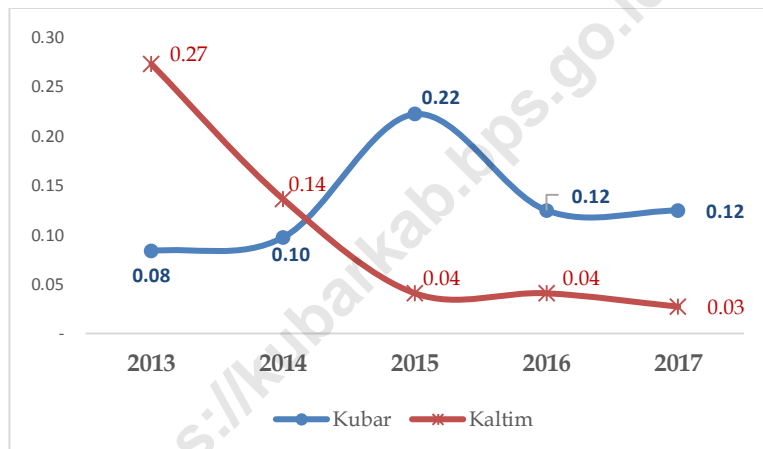
Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Selama periode 2013 hingga 2017, angka harapan hidup Kabupaten Kutai Barat terus menunjukkan trend peningkatan. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2017, angka harapan hidup di Kabupaten Kutai Barat sebesar 72,37 tahun. Namun masih dibawa rata-rata angka harapan hidup Kalimantan Timur yang sebesar 73,70 tahun.

Secara rata-rata, selama periode 2013-2017, terdapat peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Kutai Barat. Pertumbuhan angka harapan hidup tercepat adalah di Kabupaten Kutai Barat terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 0,22 persen. Capaian pertumbuhan angka harapan hidup di Kabupaten Kutai Barat selama periode tersebut masih diatas capaian Kalimantan Timur.

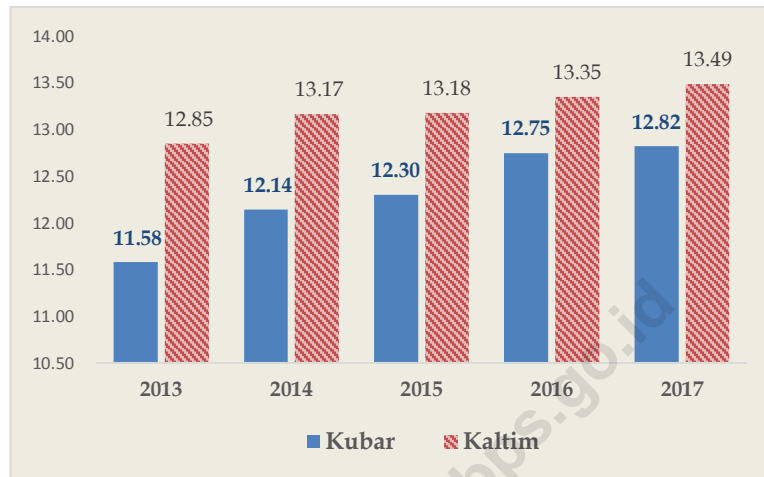
Gambar 3.4 Peningkatan per Tahun Angka Harapan Hidup Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2017 (persen)



3.2 Kesempatan Memperoleh Pendidikan Semakin Luas

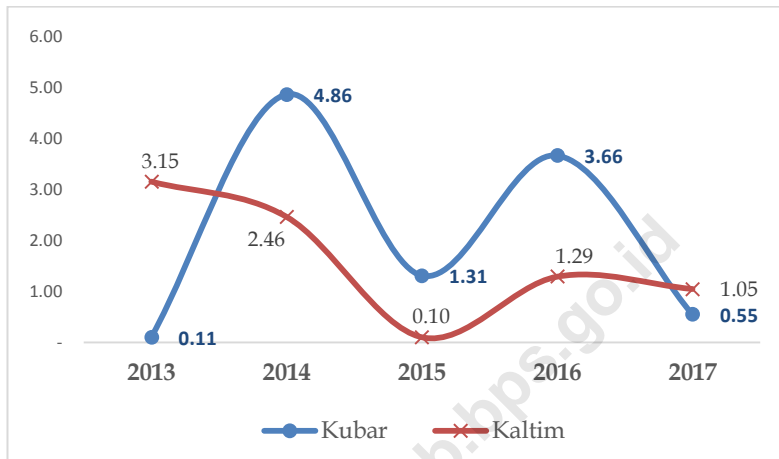
Komponen pendidikan merupakan gambaran kondisi dari dimensi pengetahuan yang ada di masyarakat. Dimensi tersebut diukur dengan menggunakan dua ukuran, yaitu angka harapan lama sekolah (*expected years schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*). Angka harapan sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Indikator tersebut merupakan alat ukur untuk mengevaluasi berbagai program pendidikan jangka pendek. Indikator rata-rata lama sekolah merupakan gambaran indikator output pemangunan jangka panjang. Kedua indikator tersebut secara bersama menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 3.5 Angka Harapan Sekolah (*Expected Years Schooling*) Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



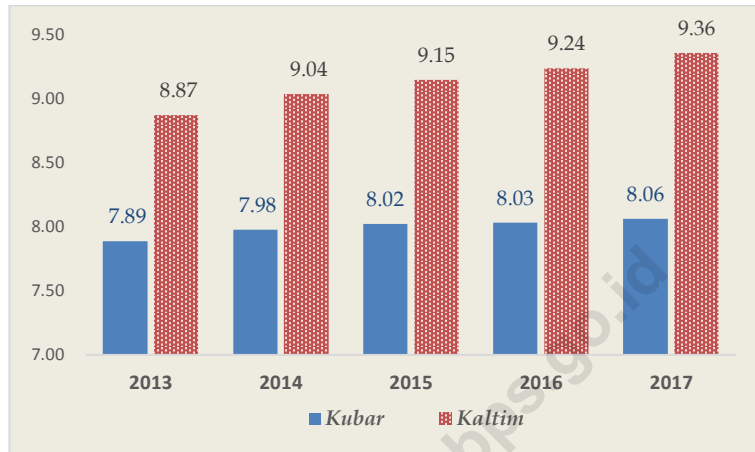
Gambar 3.5 menunjukkan perkembangan angka harapan sekolah di Kabupaten Kutai Barat. Secara umum, sepanjang periode 2013-2017 terdapat peningkatan pada harapan lama sekolah penduduk di Kutai Barat. Namun angka harapan hidup sekolah di Kutai Barat masih dibawah rata-rata Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, angka harapan sekolah di Kutai Barat mencapai 12,82 tahun, sedangkan Kalimantan Timur sebesar 13,49 tahun. Namun jika diamati rata-rata peningkatannya selama tahun 2013-2017, ternyata laju peningkatan angka harapan sekolah di Kutai Barat yang sebesar 2,10 persen, lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,61 persen. Peningkatan tertinggi yang dicapai Kutai Barat terjadi pada tahun 2014 yaitu 4,86 persen.

Gambar 3.6 Peningkatan per Tahun Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years Schooling*) Nasional, serta Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)



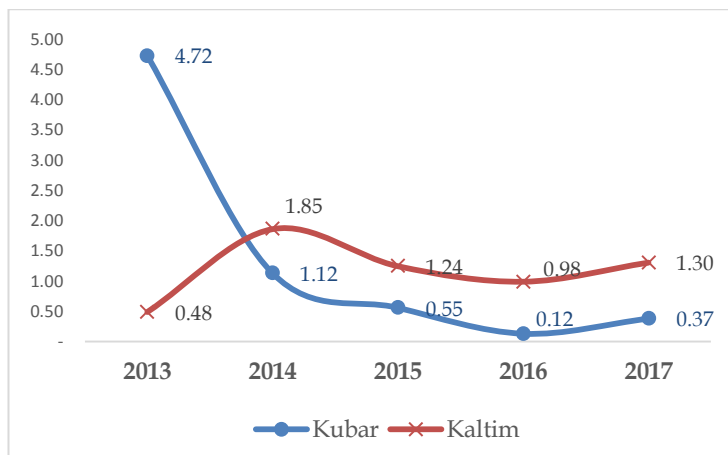
Data menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017 terdapat perbaikan pada indikator rata-rata lama sekolah di wilayah Kutai Barat. Namun demikian, rata-rata lama sekolah masyarakat di Kutai Barat masih lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur. Masyarakat dengan rata-rata lama sekolah di Kutai Barat sepanjang periode tersebut berada pada berkisar 7 - 8 tahun. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah tingkat Provinsi selama periode 2013-2017 yang berada pada kisaran 8 - 9 tahun. Titik puncak capaian rata-rata lama sekolah di Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur terjadi pada tahun 2017 yaitu masing-masing sebesar 8,06 tahun dan 9,36 tahun, seperti pada Gambar 3.7. Artinya dalam kurun waktu tersebut rata-rata lama sekolah cenderung meningkat.

Gambar 3.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling*) Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Selama periode 2013-2017, secara umum terlihat bahwa peningkatan indikator angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kutai Barat, yaitu sebesar 1,38 persen, berada di atas peningkatan angka rata-rata lama sekolah Kalimantan Timur yang meningkat sebesar 1,17 persen per tahun. Meskipun dalam empat tahun terakhir, peningkatan rata-rata sekolah di Kutai Barat menunjukkan perlambatan.

Gambar 3.8 Peningkatan per Tahun Angka Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling*) Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)



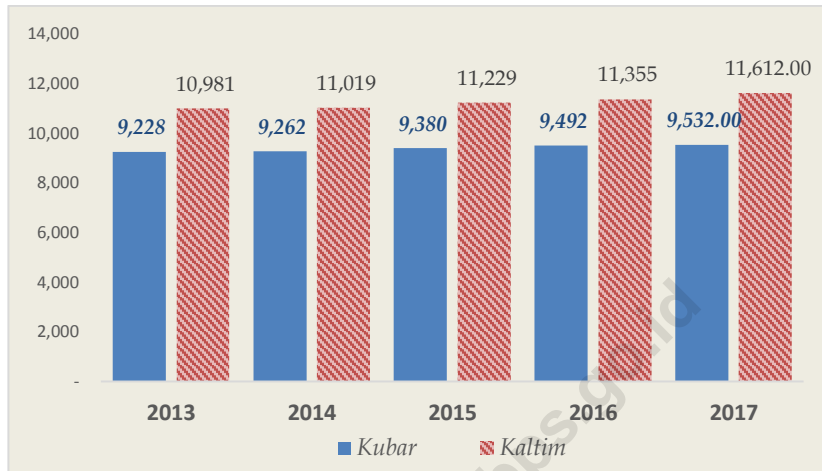
3.3 Standar Hidup Semakin Meningkat

Selain dimensi kesehatan dan pendidikan, terdapat dimensi ekonomi yang termasuk juga kedalam komponen pembentuk IPM. Dimensi ekonomi diukur oleh indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu negara, maka semakin tinggi pula daya beli penduduk negara tersebut.

Tingkat daya beli masyarakat yang tinggi merepresentasikan kemampuan masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Hal ini berarti bahwa kondisi daya beli masyarakat yang tinggi menyediakan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tersedianya pilihan yang lebih luas bagi masyarakat merupakan gambaran peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, walaupun tidak bersifat mutlak hubungan antara peningkatan rata-rata riil masyarakat dengan peningkatan pembangunan manusia, namun adanya perkembangan positif pada dimensi ekonomi memperbesar peluang adanya peningkatan pembangunan manusia di suatu wilayah.

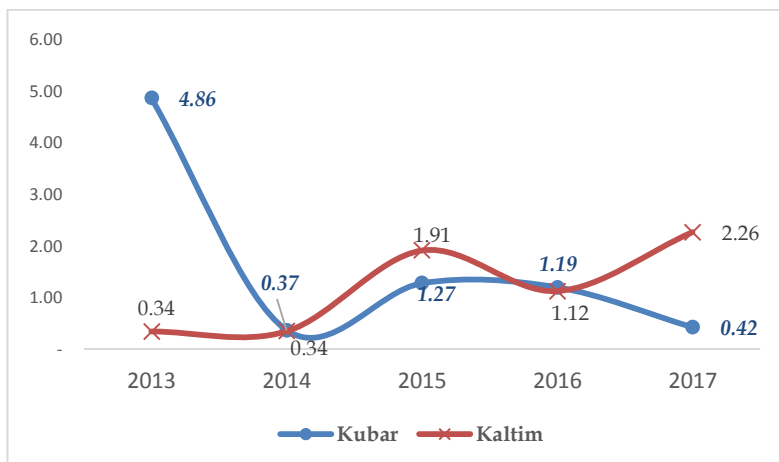
Gambar 3.9 Menunjukkan perkembangan rata-rata pengeluaran riil Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2013 hingga 2017. Gambar menunjukkan bahwa terdapat peningkatan antar waktu dari nilai rata-rata pengeluaran riil masyarakat di seluruh di Kutai Barat dan Provinsi. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kutai Barat. Jika dilakukan perbandingan, Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki nilai rata-rata pengeluaran yang paling tinggi dibandingkan wilayah kabupaten Kutai Barat sepanjang periode tersebut.

Gambar 3.9 Rata-rata Pengeluaran Riil Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2017



Gambar 3.10 menunjukkan besaran peningkatan per tahun dari rata-rata pengeluaran riil Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2013 hingga 2017. Rata-rata peningkatan pengeluaran riil masyarakat Kutai Barat adalah sebesar 1,62 persen per tahun. Besaran tersebut berada diatas rata-rata Kalimantan Timur yang sebesar 1,20 persen per tahun.

Gambar 3.10 Peningkatan Rata-rata Pengeluaran Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (persen)





BAB 4

PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

<https://kubakab.go.id>



4

PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan. Penduduk tidak saja berperan sebagai sasaran pembangunan tetapi juga menjadi pelaksana pembangunan. Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas serta pengarahan mobilitasnya yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks penduduk sebagai potensi SDM, mengandung arti bahwa penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Peranan penduduk dalam pembangunan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam menjawab semua tantangan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktifitas dan efektifitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya tentu akan mendorong naiknya angka IPM.

Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Untuk itu pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat

kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Program pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, dan mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Target grup program pembangunan kesehatan lebih ditekankan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat tertinggal. Peran serta masyarakat terus ditingkatkan melalui pengelolaan kesehatan terpadu, termasuk dunia usaha. Secara kuantitas dan kualitas penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, penyediaan obat juga terus ditingkatkan. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

4.1 Trend Demografi

Dalam pembangunan, penduduk memegang dua peran sekaligus yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam peran ganda ini sudah sepatutnya pembahasan tentang dinamika penduduk dalam pembangunan dapat dicermati sesuai dengan ukuran kualitas dan kuantitasnya.

Kepadatan penduduk menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayah di Kabupaten Kutai Barat terlihat belum merata, sehingga terjadi perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar wilayah (kecamatan). Pada tahun 2017 kepadatan penduduk di Kutai Barat sebesar 7,22 jiwa per km². Ini berarti bahwa setiap 1 km² wilayah dihuni oleh 7 sampai dengan 8 jiwa. Terdapat perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah (Kecamatan) yang cukup besar. Kepadatan

penduduk yang tertinggi pada umumnya berada di pusat pemerintahan (ibukota kabupaten) dan pusat perdagangan serta industri, seperti Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak. Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah terkonsentrasi di daerah pedesaan dengan wilayah yang luas, misalnya di Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Siluq Ngurai.

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kutai Barat masih lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh besaran rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 111,78 di tahun 2017. Hal ini berarti bahwa untuk setiap penduduk 100 perempuan, maka terdapat 112 orang penduduk laki-laki.

Tabel 4.1 Indikator Demografi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2017

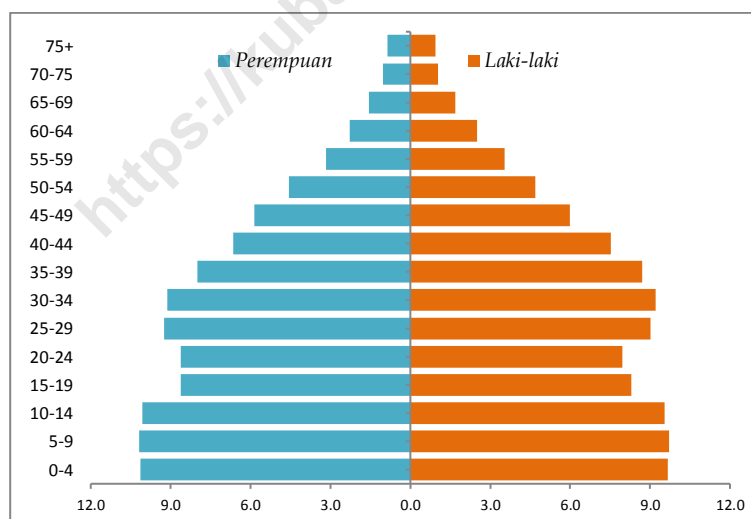
Indikator Demografi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (orang)	144.018	144.892	145.838	146.307	146.998
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,64	0,61	0,65	0,32	0,47
Rasio Jenis Kelamin (persen)	112,09	112,20	111,89	111,99	111,78
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	7,07	7,11	7,16	7,18	7,22
Komposisi Penduduk (persen):					
• 0-14 tahun	29,63	29,63	29,62	29,62	29,61
• 15-64 tahun	66,83	66,83	66,84	66,84	66,84
• 65+ tahun	3,54	3,54	3,55	3,55	3,56

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Untuk melihat komposisi penduduk Kabupaten Kutai Barat dapat digunakan piramida penduduk karena dapat menggambarkan kondisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Dari sisi komposisi penduduk terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, sementara itu jumlah penduduk tidak produktif yaitu penduduk usia 0-

14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, komposisi penduduk usia 15-64 tahun sebesar 66,83 persen menjadi 66,84 persen pada tahun 2017, sementara itu komposisi penduduk usia 0-14 tahun menurun dari 29,64 persen menjadi 29,62 persen. Namun sebaliknya yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan dari 3,53 persen menjadi 3,55 persen. Hal tersebut menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Kutai Barat terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 49,626 menurun menjadi 49,612 pada tahun 2017, yang berarti setiap 100 penduduk produktif di Kutai Barat menanggung 49 hingga 50 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia.

Gambar 4.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 (persen)



Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

4.2 Akses Layanan Dan Sumber Daya Kesehatan

Salah satu perwujudan dari usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh akses ke layanan kesehatan secara

lebih mudah. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan pembangunan kualitas kesehatan antara lain adalah untuk mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2017 terdapat 449 orang tenaga kesehatan yang tersebar di kecamatan di Kutai Barat, yang terdiri dari 25 tenaga medis, 249 tenaga keperawatan, 156 tenaga kebidanan, dan 19 tenaga kefarmasian. Sedangkan jumlah dokter di Kutai Barat sebanyak 68 dokter yang terdiri dari 12 Dokter Spesialis, 43 Dokter Umum, dan 13 Dokter Gigi yang bertugas di puskesmas ataupun rumah sakit.

4.3 Daya Tahan Untuk Bertahan

Daya tahan seseorang seringkali dipengaruhi kondisinya ketika masa balita dan saat dilahirkan. Karena itu, siapa yang menjadi penolong kelahiran sangat penting sebagai indikator kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan anaknya. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan, keselamatan ibu dan bayi, serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari yang ditolong oleh dukun, famili atau

lainnya.

Sebagian besar proses persalinan di Kutai Barat banyak ditangani oleh tenaga kesehatan, yaitu sebanyak 99,99 persen: 28,62 persen kelahiran balita ditolong oleh dokter (dokter kandungan: 26,46 persen dan dokter umum: 2,16 persen), 64,23 persen ditolong oleh bidan, 1,62 persen oleh perawat dan sisanya oleh tenaga kesehatan lainnya (5,52 persen). Sebaliknya hampir tidak ada (nol persen) wanita yang melahirkan dengan dibantu oleh tenaga diluar medis, seperti dukun beranak. Gambaran ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk di wilayah Kutai Barat telah memiliki kesadaran untuk menggunakan dan mengakses layanan kesehatan yang tersedia di wilayahnya.

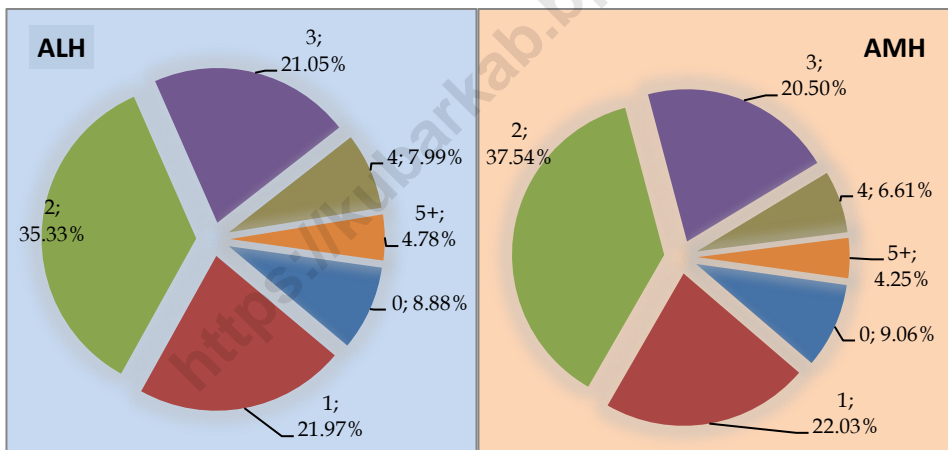
Pemberian imunisasi kepada balita merupakan langkah efektif agar di kemudian hari mereka dapat terhindar dari penyakit. Sebagian besar balita di Kutai Barat telah mendapatkan imunisasi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran persentase yang cukup tinggi dari balita yang telah menerima beberapa jenis imunisasi yang merupakan program Pemerintah, seperti BCG (90,22 persen), DPT (83,22 persen), Polio (91,96 persen), campak/MMR (64,64 persen) dan Hepatitis B (80,18 persen).

Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok wanita selama masa reproduksinya. Angka tersebut digunakan sebagai ukuran fertilitas perempuan yang ada disuatu wilayah. ALH Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,75 berarti bahwa kemampuan reproduksi wanita di Kutai Barat rata-rata melahirkan 1 hingga 2 orang anak. Secara persentase, jumlah anak yang dilahirkan hidup berjumlah 2 (dua) orang sebesar 35,33 persen, sedangkan jumlah anak yang dilahirkan berjumlah 1 (satu) orang sebesar 21,97 persen.

Jika disandingkan dengan indikator Anak Masih Hidup (AMH), maka dapat terlihat proporsi bayi yang meninggal (*proportion dying*). Pada tahun 2016 mempunyai rata-rata 2,11. Dengan kata lain bahwa rata-

rata jumlah anak yang masih hidup dari wanita pernah kawin usia 15-49 tahun di Kutai Barat pada tahun 2016 adalah sebanyak 2 (dua) orang anak. Indikator Anak Masih Hidup menunjukkan jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita hingga saat wawancara dilakukan. Jika perbedaan nilai antara ALH dan AMH kecil, maka menunjukkan bahwa tingkat kematian anak rendah di suatu wilayah. Rendahnya tingkat kematian anak merupakan indikasi bahwa cukup baiknya kualitas kesehatan di wilayah tersebut.

Gambar 4.2 Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 15 - 49 Tahun Menurut Jumlah Anak yang Lahir Hidup (ALH) dan Jumlah Anak yang Masih Hidup (AMH), Tahun 2016





BAB 5

PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN

<https://subkab.bps.go.id>



5

PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah sadar bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk tidak menyekolahkan

anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang mestinya belajar, namun sudah harus bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar sekolah dasar enam tahun yang kemudian disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun.

Program atau kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah ingin agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar.

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat. Tingginya derajat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya indikator-indikator pendidikan seperti tingginya angka melek huruf dan tingginya angka rata-rata lama sekolah. Untuk mendapat angka dua indikator yang tinggi tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti jumlah sekolah yang telah mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

5.1 Sumber Daya Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan dasar semakin terbuka karena pemerintah telah banyak menyediakan sarana dan prasarana.

Dunia pendidikan dewasa ini sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, dilihat dari dimensi global dimana persaingan kualitas menjadi kebutuhan utama di era globalisasi. Kemajuan pendidikan di Kutai Barat di satu sisi cukup membanggakan hal ini ditunjang dengan tersedianya seluruh strata pendidikan dengan jumlah yang memadai. Namun di sisi lain menjadi tantangan bagi kita semua karena bila ditinjau dari sisi sarana dan prasarana masih harus terus ditingkatkan kondisinya.

Hingga tahun 2017, tercatat sebanyak 309 unit sekolah yang tersedia untuk semua jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Barat dari SD hingga SLTA atau setara. Sekolah SD/MI sebanyak 217 unit yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah unit sekolah pun semakin sedikit. Untuk jenjang SLTP/MTs sebanyak 68 unit, sedangkan untuk tingkat SLTA/MA hanya sebanyak 24 unit.

Tabel 5.1 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun Ajaran 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Murid			
-SD/MI	21.159	20.524	20.597
-SLTP/MTs	9.239	9.161	9.346
-SLTA/MA	3.691	4.143	4.444
Jumlah Sekolah			
-SD/MI	215	215	217
-SLTP/MTs	64	65	68
-SLTA/MA	23	22	24
Jumlah Guru			
-SD/MI	2.088	2.410	2.135
-SLTP/MTs	638	792	767
-SLTA/MA	294	348	343

Pada tahun ajaran yang sama, tercatat bahwa sebagian besar murid, atau lebih dari 95 persen dari total murid bersekolah di sekolah negeri. Hal ini menunjukkan peranan Pemerintah yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan kualitas SDM, khususnya melalui sektor pendidikan. Jumlah murid negeri yang mayoritas tersebut sejalan dengan penyediaan sarana gedung sekolah negeri sebagai tempat belajar dan mengajar, yang mencapai lebih dari 80 persen.

Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang amat sentral dalam proses pendidikan. Karena itu, upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan para pendidik adalah suatu keniscayaan. Tabel 5.1 menunjukkan jumlah guru yang mengajar di Kutai Barat untuk setiap jenjang pendidikan. Secara umum, terlihat bahwa sebaran jumlah guru yang mengajar cukup proporsional dengan jumlah murid di masing-masing jenjang pendidikan. Dengan demikian, maka rasio murid terhadap guru relatif cukup baik di Kutai Barat. Untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA/MA/SMK rasio murid terhadap guru adalah sekitar 10 hingga 13, yang berarti bahwa setiap guru bertanggung jawab terhadap sebanyak 10 hingga 13 orang murid.

5.2 Angka Melek Huruf dan Partisipasi Sekolah

Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator pokok sebagai ukuran keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan bidang pendidikan di Kutai Barat,, terdapat gambaran yang menggembirakan pada indikator capaian sektor pendidikan seperti kemampuan membaca dan menulis penduduk. Besaran persentase Angka Melek Huruf (AMH) untuk Kabupaten Kutai Barat sudah tinggi, hingga mencapai 98,49 persen dan ada kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dirinci menurut jenis kelamin, angka melek huruf penduduk laki-laki

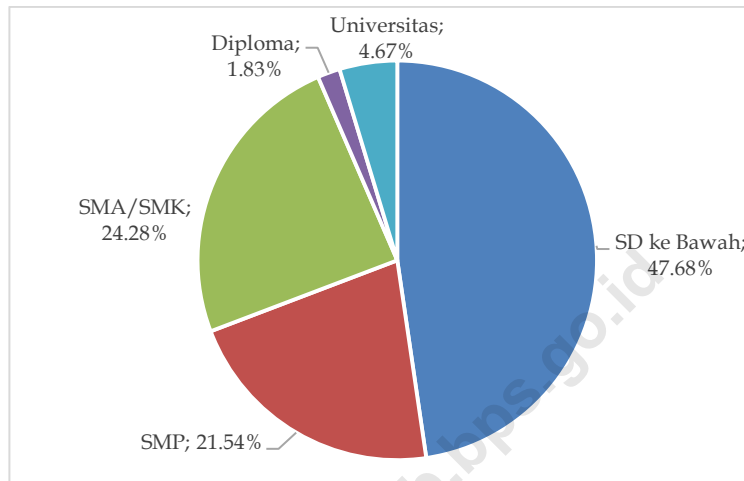
lebih tinggi, sekitar 99,53 persen, dibandingkan dengan angka melek huruf penduduk perempuan, yaitu sebesar 97,31 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara keseluruhan terlihat adanya peningkatan persentase jumlah penduduk yang melek huruf, dan besaran proporsi penduduk laki-laki yang mampu membaca dan menulis masih tetap lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 5.2 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kutai Barat, Tahun 2015-2017

Jenis Kelamin	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,46	98,80	99,53
Perempuan	96,63	97,54	97,31
Laki-Laki + Perempuan	97,62	98,22	98,49

Indikator tingkat pendidikan formal yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran untuk mengklasifikasikan kualitas seseorang. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Dalam sudut pandang penduduk sebagai subyek pembangunan, seseorang yang mempunyai kualitas tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan. Pada sisi ini, perlu usaha yang maksimal dari pemerintah daerah Kutai Barat untuk meningkatkan kualitas penduduk karena dari kelompok usia 15 tahun ke atas penduduk Kutai Barat sebanyak 47,68 persen penduduk tidak/belum tamat dan atau tamatan setingkat SD/MI, 21,54 persen penduduk tamatan SLTP/Sederajat, dan 24,28 persen penduduk tamatan SLTA/SMK/MA. Ada pun tamatan perguruan tinggi hanya 6,50 persen yang terdiri dari 1,83 persen setingkat Diploma dan 4,67 persen setingkat Universitas (Sarjana).

Gambar 5.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017



Untuk mengetahui proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, maka digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. APS dihitung dengan melihat jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Ukuran ini juga digunakan untuk melihat capaian Pemerintah dalam bidang pendidikan, yaitu dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan pendidikan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Program pembangunan sarana prasarana pendidikan yang menjangkau sampai ke pelosok daerah, serta adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk.

Pada tahun 2017, APS penduduk di Kutai Barat untuk masing-masing kelompok umur sudah baik, dimana masing-masing kelompok umur menunjukkan capaian APS yang tinggi. Bahkan APS penduduk kelompok usia 7-12 tahun telah mencapai titik tertinggi atau 100,00 persen, dengan kata lain penduduk Kutai Barat pada tahun 2017

kelompok usia tersebut secara keseluruhan telah mengenyam pendidikan (bersekolah). Untuk APS pada kelompok umur 13-15 tahun juga tinggi yaitu sebesar 99,12 persen. Sementara itu, APS kelompok umur 16-18 tahun tercatat sebesar 69,19 persen.

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kutai Barat, Tahun 2015-2017

Usia Sekolah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	98,20	100,00	100,00
13-15	96,34	98,29	99,12
16-18	74,18	67,06	69,19

APM (Angka Partisipasi Murni) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, dengan kata lain APM mengukur proporsi anak yang sekolah tepat waktu. APM dibagi dalam 3 jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Program pemerintah wajib belajar 9 tahun berarti yang menjadi sasaran program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SLTP). Pada tahun 2017, APM untuk jenjang SD adalah sebesar 100,00 persen, jenjang SLTP adalah sebesar 82,56 persen sedangkan SLTA sebesar 58,03 persen. Jika dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, capaian tahun 2017 menunjukkan trend yang positif pada semua jenjang pendidikan, kecuali SMP.

Tabel 5.4 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Di Kutai Barat, Tahun 2015-2017

Tahun	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	97,91	79,44	51,28
- Laki-laki	97,09	85,02	50,90
- Perempuan	98,69	72,08	51,74
2016	98,55	85,46	57,28
- Laki-laki	100,00	83,78	57,75
- Perempuan	96,88	87,18	56,61
2017	100,00	82,56	58,03
- Laki-laki	100,00	90,64	59,58
- Perempuan	100,00	76,35	56,04



BAB 6

PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH SUMBER DAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN STANDAR HIDUP



6

PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH SUMBER DAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN STANDAR HIDUP

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia secara utuh, pemahaman atas keterkaitan antara pembangunan manusia dengan indikator-indikator sosial dan ekonomi lainnya adalah hal yang sangat penting. Meningkatnya pembangunan manusia diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, yaitu tenaga manusia yang sehat, berpendidikan, dan terampil. Tingkat produktivitas angkatan kerja yang relatif tinggi secara langsung berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan penduduk. melalui membaiknya tingkat pendapatan sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, membaiknya tingkat kesejahteraan rumah tangga akan mendukung tercapainya kualitas/standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak berarti adanya kemampuan finansial bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kemampuan untuk meberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota rumah tangga, khususnya anak-anak.

Kemampuan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anggota rumah tangga juga berarti investasi dalam pengembangan kualitas SDM di masa mendatang. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, jika terjadi secara merata di antara sebagian besar rumah tangga akan menjamin daya beli yang cukup dari individu-individu rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan.

6.1 Kinerja Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Angka PDRB merupakan ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan ekonomi daerah. PDRB yang dihitung dengan melakukan pendekatan produksi merupakan PDRB menurut lapangan usaha. Secara umum, angka tersebut menggambarkan kemampuan berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah di suatu wilayah.

Struktur perekonomian Kutai Barat hingga saat ini masih didominasi Lapangan Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Pertambangan khususnya komoditas Batubara, yang terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kutai Barat. Pada tahun 2017, sumbangan yang terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 50,27 persen, kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,61 persen), Konstruksi (11,09 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (6,73 persen) serta Industri Pengolahan (6,19 persen). Sementara peranan Lapangan Usaha lainnya masih di bawah 5 persen.

Kinerja perekonomian Kutai Barat pada tahun 2017 tumbuh positif sebesar 3,58 persen setelah pada dua tahun terakhir mengalami kontraksi sebesar -1,50 persen di tahun 2015 dan -0,81 di tahun 2016, seiring dengan situasi ekonomi global dan nasional yang kurang kondusif. Ditinjau PDRB Menurut Lapangan Usaha, kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 3,61 persen setelah pada tahun 2016 terkoreksi sebesar -3,43 persen. Dan juga lapangan usaha Konstruksi tumbuh sebesar 1,81 persen, lebih tinggi dari tahun 2016 yang terkoreksi sebesar -1,85 persen. Sama halnya dengan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif dan ada kecenderungan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, kecuali Administrasi Pemerintahan yang mengalami

kontraksi sebesar -2,87 persen sebagai dampak pemotongan (rasionalisasi) anggaran pemerintah.

Tabel 6.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Kabupaten Kutai Barat, Tahun 2014 - 2017

Lapangan Usaha	2014	2015 ^r	2016*	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.934.030,9	3.059.936,7	3.358.877,4	3.740.485,9
B Pertambangan dan Penggalian	11.507.054,9	10.535.285,4	10.320.234,6	12.873.330,6
C Industri Pengolahan	1.124.103,0	1.174.497,2	1.365.910,8	1.584.426,0
D Pengadaan Listrik dan Gas	2.141,7	3.840,7	4.235,5	5.377,5
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.331,0	6.710,3	7.235,7	7.930,9
F Konstruksi	2.308.340,2	2.588.947,6	2.671.987,5	2.839.149,9
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.331.424,7	1.460.128,8	1.581.448,2	1.722.595,4
H Transportasi dan Pergudangan	308.631,5	324.866,7	338.160,3	374.026,4
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.473,9	65.178,1	70.517,7	77.628,4
J Informasi dan Komunikasi	187.550,1	205.104,8	221.910,4	245.237,5
K Jasa Keuangan dan Asuransi	26.092,8	27.079,6	28.183,1	30.448,4
L Real Estat	118.076,6	125.920,6	127.896,4	136.568,1
M,N Jasa Perusahaan	12.977,9	13.303,2	14.159,8	15.511,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.055.832,0	1.165.635,4	1.283.237,5	1.274.305,2
P Jasa Pendidikan	279.617,4	325.565,5	361.508,3	401.630,7
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.582,4	159.438,3	177.849,2	203.031,9
R,S, T,U Jasa lainnya	47.499,3	56.850,6	66.759,3	78.219,6
Produk Domestik Regional Bruto	21.442.760,4	21.298.289,7	22.000.111,6	25.609.904,2

Tabel 6.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2014–2017

Lapangan Usaha		2014	2015 ^r	2016 [*]	2017 ^{**}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,68	14,37	15,27	14,61
B	Pertambangan dan Penggalian	53,66	49,47	46,91	50,27
C	Industri Pengolahan	5,24	5,51	6,21	6,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	10,77	12,16	12,15	11,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,21	6,86	7,19	6,73
H	Transportasi dan Pergudangan	1,44	1,53	1,54	1,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,31	0,32	0,30
J	Informasi dan Komunikasi	0,87	0,96	1,01	0,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,13	0,13	0,12
L	Real Estat	0,55	0,59	0,58	0,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,92	5,47	5,83	4,98
P	Jasa Pendidikan	1,30	1,53	1,64	1,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,75	0,81	0,79
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,22	0,27	0,30	0,31
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2014–2017

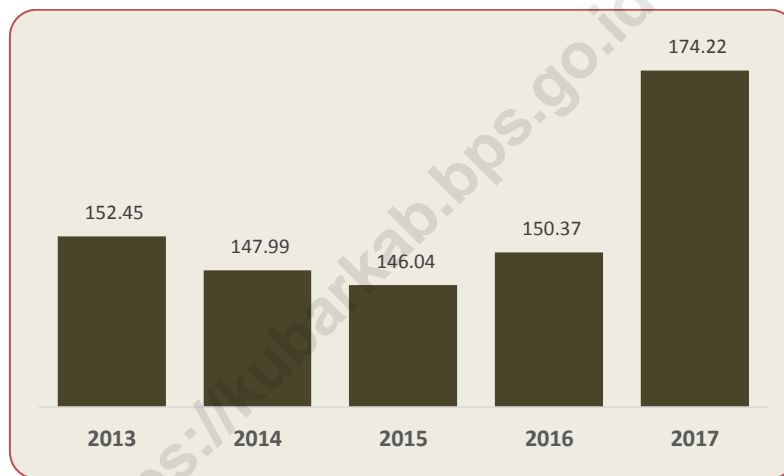
Lapangan Usaha		2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,42	4,54	3,64	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	(2,31)	(5,94)	(3,43)	3,61
C	Industri Pengolahan	4,63	5,03	4,34	5,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,81	31,72	8,42	10,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,72	2,97	3,26	5,76
F	Konstruksi	8,17	5,84	(1,85)	1,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,96	4,32	2,79	3,94
H	Transportasi dan Pergudangan	3,97	1,68	1,66	6,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,71	6,13	3,25	5,92
J	Informasi dan Komunikasi	11,93	8,41	6,26	7,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	0,87	1,67	4,38
L	Real Estat	6,44	2,41	(0,79)	3,37
M,N	Jasa Perusahaan	8,62	(1,36)	(1,70)	2,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,39	2,97	5,53	(2,87)
P	Jasa Pendidikan	16,90	9,19	6,69	7,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,47	8,14	6,72	8,85
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,67	9,59	8,08	7,90
Produk Domestik Regional Bruto		1,88	(1,50)	(0,81)	3,58

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita, khususnya pendapatan riil masyarakat secara terus menerus.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per

kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. PDRB per kapita lebih tepat hanya untuk melihat produktifitas penduduk suatu wilayah, walaupun kadangkala angka ini dijadikan proxy pendapatan perkapita karena keterbatasan data yang ada.

Gambar 6.1 Perkembangan PDRB Perkapita Kutai Barat (Juta Rp), Tahun 2013–2017



Pada tahun 2017, PDRB perkapita Kutai Barat mencapai 174,22 juta rupiah mengalami peningkatan sebanyak 23,85 juta rupiah dari tahun 2016 atau meningkat signifikan sebesar 15,86 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2016 yang tumbuh 2,96 persen. Dan jika diamati selama 2013-2017, PDRB perkapita Kutai Barat bergerak cukup variatif meskipun ada kecenderungan semakin menurun di tahun 2014-2015. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kutai Barat masih bertumpu dan dipengaruhi oleh fluktuasi harga batubara dan kinerja pertambangan batubara tersebut. Dan hal ini bisa menjadi suatu proteksi dini dan sinyal yang membutuhkan perhatian dari pengambil kebijakan pembangunan ekonomi di Kutai Barat ke depan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Jalan Paulus Doy Lambeng Jalur II No.4
Kodepos 75776

ISBN 978-602-90425-02-5



9

786029

175325